



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LAMBANG KURNIAWAN, SE,MM
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 465886

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.360.700.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 6607 m2 di KAB / KOTA LUWU, HIBAH TANPA AKTA Rp. 660.700.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 126.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
4. MOTOR, YAMAHA XABRE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
5. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 5.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 70.150.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.561.850.000



III. HUTANG

Rp.

6.400.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.555.450.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.